

Model Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Dalam APBD Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh

This study aims to examine (1) the influence of local revenue on capital expenditure (2) the effect of revenue-sharing funds on capital expenditures of districts / municipalities in Aceh. The population in this study is the Local Government Financial Report (LKPD) obtained from the APBA data in the form of local revenue data, special allocation funds, and capital expenditures in 23 districts / cities in Aceh from 2013 until 2015 with a total population of 69 LKPD . The method of analysis used in this study is multiple linear regression. The results of this study indicate that (1) local own revenues and special allocation funds have simultaneous effect on capital expenditures on district / municipal governments in Aceh. (2) whereas partially, the original revenues have a significant effect on capital expenditure, while special allocation funds also affect the capital expenditure of the Regency / City in Aceh.

Keywords : *Capital Expenditure, Local Original Income, Special Allocation Fund..*

Dy Ilham Satria, Munandar
*Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Malikussaleh
Lhokseumawe*

PENDAHULUAN

Upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007).

Menurut Halim (2007:101) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama: 1) Belanja Modal Tanah, 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, 5) Belanja Modal Fisik Lainnya.

Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.

Potensi keuangan daerah yang tidak sama menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk mengurangi kesenjangan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan, lahir Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat melalui UU No.18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Proporsi pendapatan untuk sumber daya minyak dan gas adalah 70%. Ketetapan ini melebihi otonomi biasa yang

mengatur pembagian pendapatan provinsi hanya 15% dari minyak dan 35% dari gas. Pemberian otonomi dan proporsi pendapatan yang cenderung besar ini diharapkan dapat menggenjot pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Aceh yang jauh tertinggal dibandingkan kemajuan ekonomi provinsi lain di Indonesia, yang pada akhirnya pencapaian tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

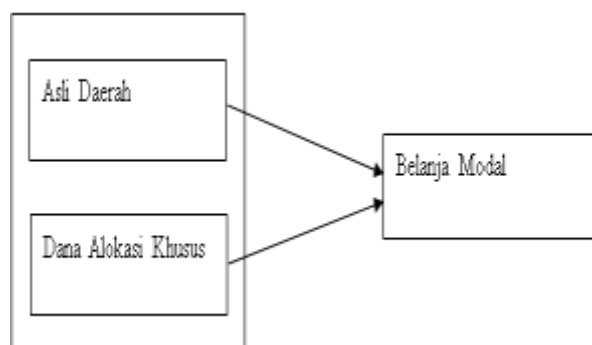
TINJAUAN TEORITIS

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim 2007:101). Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Pendapatan Daerah sesuai UU No.33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Lain-lain PAD yang sah, meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
 - b. jasa giro
 - c. pendapatan bunga
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
 - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
 - f. Menurut (Abdullah & Riza, 2015) Penyusunan anggaran merupakan bagian dari perencanaan, sedangkan pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari manajemen. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi

penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dll.



Gambar 1
Skema Kerangka Pemikiran

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Dalam konteks internasional, beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja. Cheng (1999) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bahwa tax-spend hypothesis berlaku untuk kasus Pemda di beberapa negara Amerika Latin, yakni Columbia, Republik Dominika, Honduras, dan Paraguay. Selanjutnya Friendman (1978) dalam Abdullah dan Halim (2003) menyatakan bahwa dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga akan memperbesar defisit. Hoover dan Sheffrin (1992) dalam Abdullah dan Halim (2003) secara empiris menemukan adanya perbedaan hubungan dalam dua rentang waktu berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an pajak dan belanja tidak saling mempengaruhi (causally independent). Abdullah (2013) menyatakan bahwa perubahan target atas Pendapatan Asli Daerah dapat berpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. Dari perspektif agency theory, pada saat penyusunan APBD murni, eksekutif (dan mungkin juga dengan sepengetahuan dan/ atau persetujuan legislatif) target PAD ditetapkan di bawah potensi, lalu dilakukan “adjustment” pada saat dilakukan perubahan APBD. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011).

Legrenzi dan Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) yang menggunakan sampel *municipalities* di Italia, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Dari hasil penelitian mereka dapat disimpulkan secara spesifik bahwa variabel-variabel kebijakan Pemda dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima. Selanjutnya, Holtz-Eakin et al (1985) dalam Abdullah dan Halim (2003) juga menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pempus dengan belanja Pemda.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka hipotesis kedua dinyatakan sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Aceh dari tahun 2013 s.d 2015. Dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu dengan mengambil keseluruhan populasi. Objek penelitian adalah APBD bidang kesehatan Kabupaten/Kota di Aceh. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder yang bersumber dari laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, yakni data PAD, Anggaran Dana Bagi Hasil dan perubahan, Belanja Modal dan belanja modal perubahan di bidang Kesehatan yang diperoleh dari Dinas Keuangan Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan catatan-catatan yang menjadi bahan penelitian. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data *cross section* dengan metode panel data, periode waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dari masing-masing data APBD

dan APBD Perubahan Kabupaten/Kota yang akan dijadikan data.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Menurut Mahmudi (2010:96), Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, software, dan sebagainya. Perubahan anggaran belanja modal diukur dari selisih antara jumlah belanja modal dalam APBD Perubahan dan APBD Murni.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004), yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim,2007:96). Perubahan Anggaran PAD mencerminkan penyesuaian yang dilakukan untuk target PAD sebagai akibat dari kebijakan pemerintah daerah terkait anggaran daerah. Perubahan PAD diukur dengan selisih antara anggaran PAD dalam APBD murni/ awal.

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Ikhlis 2011).

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap perubahan belanja modal pada kabupaten/kota di Aceh. Data diolah dengan program *statistical package for social science* (SPSS). Model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

HASIL PENELITIAN

Hasil Deskriptif Data Penelitian

Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, dan nilai maksimum. Hasil statistik deskriptif untuk Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal (BM), dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 1
Deskriptif Data Penelitian

Variabel	N	Min	Maks	Mean	Std. Deviasi
PAD	69	8,1	192,5	61,9	44,8
DAK	69	27,3	106,0	58,5	17,3
BM	69	50,6	449,0	191,7	78,7

Berdasarkan tabel diperoleh Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah selama 3 tahun, nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 61,9 Milyar Rupiah, nilai minimum sebesar 8,1 Milyar Rupiah (Kabupaten Subulussalam) pada tahun 2013 dan nilai maksimum sebesar 192,5 Milyar Rupiah (Kabupaten Aceh Utara) pada tahun 2015. Nilai standar deviasi selama 3 tahun pengamatan sebesar 44,8.

Dana Alokasi Khusus nilai rata-rata (*mean*) selama 3 tahun sebesar 58,5 Milyar Rupiah, nilai minimum sebesar 27,3 Milyar Rupiah (Kabupaten Subulussalam) pada tahun 2013 dan nilai maksimum sebesar 106,0 Milyar Rupiah (Kabupaten Aceh Timur) pada tahun 2015. Nilai standar deviasi selama 3 tahun pengamatan sebesar 17,3.

Belanja Modal memperoleh rata-rata (*mean*) selama 3 tahun sebesar 191,7 Milyar Rupiah, nilai minimum sebesar 50,6 Milyar Rupiah (Kota Langsa) pada tahun 2013, dan nilai maksimum sebesar 449,0 Milyar Rupiah (Kabupaten Aceh Utara) pada tahun 2014. Nilai standar deviasi selama 3 tahun pengamatan adalah sebesar 78,7.

Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda dari pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

BM	=	3,786 + 0,661PAD + 1,929 DAK + ε
R	=	0,639
R ²	=	0,408

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta (a) sebesar 3,786, artinya jika pendapatan asli daerah (X1), dana alokasi khusus (X2) dianggap konstan, maka belanja modal adalah mempunyai nilai sebesar 3,786.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pengujian hipotesis yang menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Metode analisis linear berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan dengan beberapa variabel independen dalam suatu model penelitian. Maka dilakukan uji signifikan terhadap nilai koefisien regresi yang diperoleh baik secara simultan maupun secara parsial.

Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,661 jika Pendapatan Asli Daerah meningkat 1% maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 66,1%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Aceh mengalami peningkatan maka Belanja Modal juga akan meningkat.

Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 1,929, jika Dana Alokasi Khusus meningkat 1% maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 192,9%. Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Khusus sangat menunjang untuk anggaran Belanja Modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Aceh. Artinya bila Pendapatan Asli Daerah meningkat Rp. 1 maka Belanja Modal akan meningkat pula sebesar Rp. 0,661.

Hal tersebut bermakna bahwa Pendapatan Asli Daerah ikut meningkatkan Anggaran Belanja Modal. Belanja Modal merupakan bagian APBD yang dialokasikan di dalam belanja tidak langsung. Tujuan dari keberadaan belanja modal bidang adalah untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrument keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat apabila daerah sudah dapat memenuhi kebutuhan belanja guna terpenuhinya pelayanan minimum yang telah ditetapkan pemerintah (Ritonga, 2009).

Di Aceh, Pendapatan Asli Daerah selain di alokasikan untuk Belanja Modal, alokasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah juga untuk belanja operasi pegawai. Hal tersebut karena belanja pegawai akan diharapkan meningkatkan kinerja aparatur daerah untuk terus berusaha meningkatkan pelayanan publik, penyediaan fasilitas infrastruktur yang memadai. Selanjutnya juga dapat meningkatkan kemampuan administrasi pemungutan pajak dan retribusi di daerah sehingga sumber penting penerimaan daerah yaitu PAD dapat digunakan untuk membiayai pembangunan baik fisik maupun non-fisik (Ifrizal, 2015).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Abdullah (2013) yang menyatakan bahwa perubahan atas pendapatan terutama PAD, bisa berlatarbelakang perilaku oportunistik para pembuat keputusan, khususnya birokrasi di SKPD dan SKPKD. Namun tak jarang perubahan APBD juga memuat preferensi politik para politisi di DPRD.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2008) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi belanja modal. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Kusnandar & Siswanto (2011) yang hasilnya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Aceh. Artinya

bila Dana Alokasi Khusus meningkat Rp. 1 maka Belanja Modal akan menurun sebesar Rp. 1,929.

Diperoleh hubungan yang positif antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal. Hal ini bermakna bahwa pengalokasian anggaran Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah lebih ditujukan untuk alokasi anggaran belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proporsional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja.

DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DAK meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aqnisa (2016) yang menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Juga sejalan dengan hasil penelitian Abdullah & Rona (2015) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

Pengaruh Penadapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pengaruh yang dihasilkan lemah yaitu sebesar 0,408 atau 40,8% (<50%), hal tersebut juga sesuai dengan nilai derajat hujungan (korelasi) antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal yang diperoleh sebesar 0,639. Nilai tersebut bermakna bahwa hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus mempunyai hubungan positif, searah namun lemah terhadap Belanja Modal.

Alasan terjadi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi karena faktor ekonomi, politik, dan sosial, namun pada umumnya karena faktor financial dan kebutuhan fiskal. Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atas pengeluaran. Perubahan APBD menjadi sarana bagi legislatif dan eksekutif untuk merubah alokasi anggaran secara legal. Perilaku oportunistik legislatif dan eksekutif saat perubahan APBD dapat mengakibatkan terjadinya misalokasi anggaran belanja pemerintah. Kecenderungan Pendapatan Asli Daerah yang selalu bertambah saat perubahan anggaran, membuka peluang bagi legislatif untuk merekomendasikan penambahan anggaran bagi program dan kegiatan yang menjadi preferensinya (Abdullah, 2013).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Dougherty, et al. (2003) dimana Perubahan anggaran dilakukan agar lebih bermanfaat dalam pelaksanaan jangka panjang dalam siklus anggaran baik sebelum maupun dimasa yang akan datang, penyesuaian dilakukan dalam tahun anggaran berjalan karena adanya pertumbuhan pendapatan ekonomi yang memberi kontribusi terhadap peningkatan *surplus* terhadap penyesuaian terutama di bidang belanja modal. Hal ini juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2008) dimana Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Siswanto (2011) yang menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah, sisa lebih penggunaan anggaran dan luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Juga sesuai dengan hasil penelitiannya Aqnisa (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh Terhadap Belanja Modal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil yang telah diuraikan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Aceh.
2. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus untuk Belanja Modal Kabupaten/Kota di Aceh lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah.

Saran

Adapun yang menjadi saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menambah variabel independen yang lain, seperti Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil untuk penelitiannya.
2. Bagi pemerintah Daerah agar dapat memaksimalkan potensi daerah yang ada agar Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh dapat memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar sehingga tidak hanya mengandalkan dana alokasi khusus untuk belanja modal.

Keterbatasan

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai pengaruh belanja modal hanya menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil. Masih banyak variabel lain yang belum masuk atau kemungkinan memiliki pengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal bidang.
2. Masih kurangnya referensi tentang Belanja Modal di Aceh, referensi yang ditemukan masih bersifat umum yaitu tentang belanja modal secara nasional.

REFERENSI

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi, Oktober. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Abdullah, Syukriy & Riza Rona. 2015. Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Studi atas Perubahan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia. *Makalah dipresentasikan pada Konferensi Regional Akuntansi (KRA) ke-II, IAI Wilayah Jawa Timur, di Universitas Kanjuruhan, Malang, 29-30 April 2015*.
- Cornia, Gray C, Ray D. Nelson & Andera Wilko. 2004. Fiskal Planning, Budgeting, and Rebudgeting Using Revenue Semaphores. *Public Administration Review*. Vo.64, No. 2 (Mar – Apr): 164 – 179.
- Dougherty, Michael John, Kenneth A. Klase & Soo Geun Song. 2003. Managerial Necessity and The Art of Creating Surpluses: The Budget-Execution Process in West Virginia Cities. *Public Administration Review*. Vol. 63, No. 4 (Jul – Aug): 484 – 497.
- Forrester, Jhon P. & Daniel R. Mullins. 1992. Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Proseses. *Public Administration Review*. Vol. 52 No. 5 (Sept – Oct): 467 – 473.
- Hariato, David & Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007*.
- Halim, Abdul . 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusnandar dan Dodik Siwantoro. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa lebih pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 16: 101-11.
- Marzalita. 2014. faktor-faktor yang memengaruhi perubahan anggaran belanja barang dan jasa pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*. Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala. Vol 3 no. 3, Agustus 2014. pp 46-58.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 *tentang Otonomi Khusus Aceh*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah*
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, Permendagri No. 59 Tahun 2007 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Seकरan, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Buku Satu, Edisi keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarni, Saptaningsih. 2008. *Pengaruh Pendapatn Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta*.
- Yovita, Farah Marta. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010). *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. Semarang: UNDIP.